

STANDAR PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Seksi : Inventarisasi RPPLH dan KLHS
 Kegiatan : Dokumen Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Kota Samarinda
 Jenis Pelayanan : -

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2) Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (3) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (4) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Nasional (7) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 (8) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (9) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2.	Persyaratan	(1) SK Tim (2) Data-data bidang lingkungan hidup (3) Data spasial
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	(1) Proses pengumpulan data spasial (peta dan citra) dan non spasial (tabuler) (2) Panel ahli untuk transformasi data spasial menjadi tema daya dukung lingkungan jasa ekosistem (3) Proses analisis spasial berupa pembuatan Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem (4) Verifikasi Hasil atas Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem (5) Penyusunan Laporan Daya Dukung Daya Tampung Kota Samarinda (6) Pengesahan dan Ekspose Laporan Daya Dukung Daya Tampung Kota Samarinda
4.	Jangka waktu penyelesaian	Seluruh dokumen dikerjakan dalam jangka waktu 1 tahun penganggaran
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk pelayanan	Data dan informasi / Dokumen
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Peralatan komputer, ATK, tabel data & data spasial
8.	Kompetensi pelaksana	- Bimbingan teknis pelatihan GIS - Bimbingan teknis penyusunan DDDT-LH
9.	Pengawasan Internal	(1) Kepala DLH Kota Samarinda (2) Kepala Bidang Tata Lingkungan & Pertamanan
10.	Penanganan pengaduan	-
11.	Jumlah pelaksana	34 Orang
12.	Jumlah pelayanan dan keselamatan	-
13.	Jaminan keamanan	-
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	(1) Wali Kota Samarinda (2) DPRD Kota Samarinda (3) DLH Provinsi Kalimantan Timur (4) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI



Samarinda, 24 Februari 2021

Kasi. Inventarisasi
 RPPLH dan KLHS

Basuni, S.Hut
 NIP. 19730428 200003 1 002

STANDAR PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Seksi : Inventarisasi RPPLH dan KLHS
 Kegiatan : Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH)
 Jenis Pelayanan : -

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 (3) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda (4) Surat Edaran No : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten Kota
2.	Persyaratan	(1) SK Tim (2) Data-data bidang lingkungan hidup (3) Data spasial
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Data dan Informasi tentang KRP OPD yang berdampak luas bagi
4.	Jangka waktu penyelesaian	Seluruh dokumen dikerjakan dalam jangka waktu 1 tahun penganggaran
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk pelayanan	Data dan informasi / Dokumen
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Peralatan komputer, ATK, tabel data & data spasial
8.	Kompetensi pelaksana	- Bimbingan teknis penyusunan RPPLH - Bimbingan teknis pelatihan GIS
9.	Pengawasan Internal	(1) Kepala DLH Kota Samarinda (2) Kepala Bidang Tata Lingkungan & Pertamanan
10.	Penanganan pengaduan	-
11.	Jumlah pelaksana	35 Orang
12.	Jumlah pelayanan dan keselamatan	-
13.	Jaminan keamanan	-
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	(1) Wali Kota Samarinda (2) DPRD Kota Samarinda (3) DLH Provinsi Kalimantan Timur (4) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI



Samarinda, 24 Februari 2021

**Kasi. Inventarisasi
 RPPLH dan KLHS**

Basuni, S. Hut
NIP. 19730428 200003 1 002

STANDAR PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Seksi : Inventarisasi RPPLH dan KLHS
 Kegiatan : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda
 Jenis Pelayanan : -

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 09 Tahun 2011 tentang pedoman KLHS (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (6) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 (7) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah tahun 2005-2025 Kota Samarinda (8) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 0 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (9) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2.	Persyaratan	(1) SK Tim (2) Data-data bidang lingkungan hidup (3) Data spasial
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Data dan Informasi tentang KRP OPD yang berdampak luas bagi
4.	Jangka waktu penyelesaian	Seluruh dokumen dikerjakan dalam jangka waktu 1 tahun
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk pelayanan	Data dan informasi / Dokumen
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Peralatan komputer, ATK, tabel data & data spasial
8.	Kompetensi pelaksana	- Bimbingan teknis penyusunan KLHS - Bimbingan teknis pelatihan GIS
9.	Pengawasan Internal	(1) Kepala DLH Kota Samarinda (2) Kepala Bidang Tata Lingkungan & Pertamanan
10.	Penanganan pengaduan	-
11.	Jumlah pelaksana	35 Orang
12.	Jumlah pelayanan dan keselamatan	-
13.	Jaminan keamanan	-
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	(1) Wali Kota Samarinda (2) DPRD Kota Samarinda (3) DLH Provinsi Kalimantan Timur (4) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Samarinda, 24 Februari 2021

Mengetahui,
**Kabid. Tata Lingkungan
 & Pertamanan**



RR Dyah Maharani, ST., MMT
 NIP. 19660612 199703 2 003

**Kasi Inventarisasi
 RPPLH dan KLHS**



Basuni, S.Hut
 NIP. 19730428 200003 1 002

STANDAR PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Seksi : Inventarisasi RPPLH dan KLHS
 Kegiatan : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup Daerah (IKPLHD)
 Jenis Pelayanan : -

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (3) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2.	Persyaratan	(1) SK Tim (2) Data dan informasi bidang lingkungan hidup
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Data-data diperoleh dari bidang-bidang pada DLH Kota Samarinda dan OPD terkait
4.	Jangka waktu penyelesaian	Seluruh dokumen dikerjakan dalam jangka waktu 4 bulan
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk pelayanan	Data dan informasi / Dokumen
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Peralatan komputer, ATK, tabel data
8.	Kompetensi pelaksana	Bimbingan teknis penyusunan IKPLHD/SLHD/Nirwasita Tantra
9.	Pengawasan Internal	(1) Kepala DLH Kota Samarinda (2) Kepala Bidang Tata Lingkungan & Pertamanan
10.	Penanganan pengaduan	-
11.	Jumlah pelaksana	20 Orang
12.	Jumlah pelayanan dan keselamatan	-
13.	Jaminan keamanan	-
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	(1) Wali Kota Samarinda (2) DLH Provinsi Kalimantan Timur (3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Samarinda, 24 Februari 2021

Mengetahui,
**Kabid. Tata Lingkungan
 & Pertamanan**



RR Dyah Maharani, ST., MMT
 NIP. 19660612 199703 2 003

**Kasi. Inventarisasi
 RPPLH dan KLHS**



Basuni, S.Hut
 NIP. 19730428 200003 1 002

STANDAR PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Seksi : Inventarisasi RPPLH dan KLHS
 Kegiatan : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Samarinda
 Jenis Pelayanan : -

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (3) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2.	Persyaratan	(1) SK Tim (2) Data pemantauan lingkungan hidup
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Mengumpulkan data dari hasil pemantauan lingkungan hidup
4.	Jangka waktu penyelesaian	Seluruh dokumen dikerjakan dalam jangka waktu 1 tahun penganggaran
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk pelayanan	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Peralatan komputer, ATK & tabel data
8.	Kompetensi pelaksana	(1) Bimbingan teknis tentang penentuan IKLH (2) Bimbingan teknis tentang penentuan Indeks Kualitas Air (3) Bimbingan teknis tentang penentuan Indeks Kualitas Udara (4) Bimbingan teknis tentang penentuan Indeks Kualitas Tutupan Lahan
9.	Pengawasan Internal	(1) Kepala DLH Kota Samarinda (2) Kepala Bidang Tata Lingkungan & Pertamanan
10.	Penanganan pengaduan	-
11.	Jumlah pelaksana	20 Orang
12.	Jumlah pelayanan dan keselamatan	-
13.	Jaminan keamanan	-
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	(1) Wali Kota Samarinda (2) DLH Provinsi Kalimantan Timur (3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Samarinda, 24 Februari 2021



**Kasi. Inventarisasi
 RPPLH dan KLHS**

Basuni S. Hut
 NIP. 19730428 200003 1 002

STANDAR PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Seksi : Inventarisasi RPPLH dan KLHS
 Kegiatan : Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
 Jenis Pelayanan : -

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (4) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2.	Persyaratan	(1) SK Tim (2) Data-data bidang lingkungan hidup (3) Data PDB & PDRB
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengumpulan data dan penentuan instrumen ekonomi lingkungan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Seluruh dokumen dikerjakan dalam jangka waktu 1 tahun
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk pelayanan	Data dan informasi instrumen ekonomi lingkungan hidup
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Peralatan komputer, ATK & tabel data
8.	Kompetensi pelaksana	Bimbingan teknis tentang penyusunan instrumen ekonomi
9.	Pengawasan Internal	(1) Kepala DLH Kota Samarinda (2) Kepala Bidang Tata Lingkungan & Pertamanan
10.	Penanganan pengaduan	-
11.	Jumlah pelaksana	20 Orang
12.	Jumlah pelayanan dan keselamatan	-
13.	Jaminan keamanan	-
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	(1) Wali Kota Samarinda (2) DLH Provinsi Kalimantan Timur (3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Samarinda, 24 Februari 2021



**Kasi. Inventarisasi
 RPPLH dan KLHS**


Basuni S. Hut
 NIP. 19730428 200003 1 002